

SIARAN PERS

Koalisi Aktivis Keberlanjutan Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian

Tanggal: 1 September 2025

Menghentikan Eskalasi, Menyelamatkan Masa Depan Indonesia

Indonesia di Ambang Kehancuran: Pilih Perdamaian, Keadilan, dan Keberlanjutan—Bukan Krisis

Pendahuluan

Kami, Koalisi Aktivis Keberlanjutan untuk Indonesia yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, pegiat sosial, akademisi, dan praktisi keberlanjutan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi konflik antara masyarakat dan aparat negara yang saat ini meluas di berbagai kota besar Indonesia.

Kemarahan publik yang dipicu oleh perilaku wakil rakyat dan pejabat negara yang sikap dan kebijakannya memicu kesenjangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, dan kurangnya transparansi pemerintah kini telah berubah menjadi gelombang demonstrasi yang kian memanas. Bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, dan hilangnya nyawa adalah sinyal bahwa Indonesia berada di titik krusial. Kami menegaskan: jika eskalasi ini tidak segera dikendalikan, dampaknya akan sangat merugikan masa depan bangsa.

Dampak Politik

Situasi ini menciptakan krisis kepercayaan antara masyarakat dan negara:

- Ketidakstabilan politik akan semakin dalam, menghambat proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
- Legitimasi lembaga negara akan semakin tergerus, memunculkan potensi fragmentasi sosial dan politik.
- Risiko intervensi politik asing akan meningkat, karena lemahnya posisi tawar Indonesia di mata internasional ketika institusi dalam negeri melemah.
- Risiko kembalinya dwifungsi ABRI yang mencederai cita-cita reformasi dan semangat profesionalisme militer dan menjadi salah satu capaian penting demokrasi Indonesia

Jika kondisi ini berlanjut, proses reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola, dan agenda pembangunan nasional akan tersendat. Pemerintah akan lebih banyak mengalokasikan energi pada pengamanan politik ketimbang pembangunan rakyat.

Dampak Ekonomi

Konflik sosial dan kerusuhan politik menimbulkan ketidakpastian besar bagi pasar dan investor. Dampaknya:

- Meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi akibat penurunan produktivitas dan kesempatan kerja.
- Hengkangnya perusahaan asing dan investor baik domestik maupun asing akibat menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas Indonesia.

- Pelemahan rupiah dan gejolak pasar modal yang berujung pada kenaikan harga pangan, energi, dan kebutuhan pokok.
- Disrupsi rantai pasok di berbagai sektor strategis seperti logistik, energi, dan pangan, yang akan memukul daya beli masyarakat.
- Penurunan PDB nasional karena tertundanya proyek-proyek besar, termasuk proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta transisi energi yang sedang berjalan.

Dampak Sosial

Konflik yang berlarut-larut akan memperlebar jurang ketimpangan dan memicu disintegrasi sosial:

- Meningkatnya kecemburuan sosial dan luntarnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat dan lembaga negara.
- Meningkatnya polarisasi masyarakat, memecah belah keluarga, komunitas, dan antar wilayah.
- Beban psikososial meningkat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan pekerja informal.
- Banjir informasi keliru dan provokasi melalui media sosial mempercepat eskalasi pemecahbelahan bangsa, membuat masyarakat makin sulit memilah fakta dan opini.

Akibatnya, kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia akan semakin rapuh.

Dampak Lingkungan dan Keberlanjutan

Situasi krisis ini juga mengancam agenda keberlanjutan nasional dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):

- Membuka peluang terciptanya kebijakan dan berlanjutnya praktik yang merusak lingkungan dan memicu krisis iklim di balik konflik yang berkepanjangan.
- Penanganan krisis iklim dan program-program transisi energi berpotensi tertunda, padahal ancaman bencana iklim semakin nyata.
- Pengelolaan sumberdaya alam berisiko makin tidak transparan jika fokus pemerintah hanya pada pengamanan politik dan pemulihan jangka pendek.
- Target emisi nol bersih Indonesia tahun 2060 atau lebih cepat terancam tak dapat diwujudkan, yang akan melemahkan posisi Indonesia di forum internasional.

Singkatnya, tanpa stabilitas sosial dan politik, masa depan keberlanjutan Indonesia akan terancam.

Proyeksi Risiko dan Dampak Eskalasi

Untuk memahami besarnya risiko, kami menyusun perbandingan dua skenario berikut:

Dimensi	Skenario 1: Eskalasi Berlanjut	Skenario 2: Eskalasi Terkendali
Politik & Tata Kelola	• Legitimasi pemerintah melemah drastis. • Krisis kepercayaan publik terhadap hukum dan politik makin dalam. • Potensi fragmentasi sosial dan politik meningkat. • Lembaga negara kehilangan kapasitas membuat kebijakan yang adil dan efektif.	• Kepercayaan publik mulai pulih. • Proses demokrasi dan tata kelola membaik. • Dialog pemerintah-masyarakat mengurangi ketegangan. • Stabilitas politik kembali terjaga.
Ekonomi & Investasi	• Penarikan modal asing hingga USD 15–25 miliar. • Rupiah tertekan, berpotensi melemah >15%. • Inflasi melonjak karena rantai pasok	• Investor mempertahankan komitmennya. • Rupiah relatif stabil, inflasi terkendali. • Proyek energi terbarukan dan transisi hijau berjalan

Dimensi	Skenario 1: Eskalasi Berlanjut	Skenario 2: Eskalasi Terkendali
Sosial & Kesejahteraan	terganggu. • Proyek strategis dan investasi hijau tertunda. • Praktik korupsi berlanjut • Pelanggaran HAM dan kemiskinan meningkat. • Polarisasi sosial makin dalam. • Kekerasan meningkat, korban jiwa bertambah. • Peningkatan pengangguran akibat PHK massal. • Beban kesehatan mental masyarakat meningkat.	sesuai target. • Potensi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di >5%. • Kohesi sosial diperkuat melalui dialog dan rekonsiliasi. • Jumlah korban dan kerugian sosial diminimalkan. • Program perlindungan sosial berjalan lebih efektif. • Kepercayaan antar kelompok masyarakat meningkat.
Lingkungan	• Krisis politik mengalihkan fokus dari mitigasi krisis iklim. • Proyek restorasi dan konservasi ditunda. • Pengawasan atas kerusakan lingkungan melemah, risiko deforestasi meningkat.	• Agenda adaptasi dan mitigasi krisis iklim tetap berjalan. • Proyek konservasi dan transisi energi hijau berlanjut. • Posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global tetap kuat.
Keberlanjutan & SDGs	• Target SDGs 2030 meleset signifikan, khususnya pada Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), 8 (Pekerjaan Layak), 13 (Aksi Iklim), dan 16 (Institusi yang Kuat). • Risiko hilangnya momentum transisi energi menuju Net Zero 2060 atau lebih cepat.	• SDGs tetap menjadi acuan utama pembangunan. • Transisi energi dan agenda Net Zero berjalan sesuai rencana. • Indonesia tetap dipercaya dalam kemitraan pembangunan global.

Jika eskalasi konflik terus berlanjut, tatanan sosial (*social fabric*) akan rusak, merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, potensi pelanggaran HAM meningkat dan kerugian ekonomi bisa mencapai 2,5–4% PDB per tahun, sementara target SDGs dan Net Zero nyaris mustahil tercapai. Sebaliknya, jika situasi terkendali, Indonesia berpeluang menjaga kepercayaan global, melanjutkan investasi hijau, dan memertahankan posisinya sebagai motor pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara.

Seruan dan Ajakan Bersama

Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, parlemen, aparat keamanan, pelaku usaha, akademisi, aktivis, media, dan masyarakat luas—untuk mengambil langkah konkret dan menahan diri:

1. Memperkuat kembali tatanan hukum, sosial, nilai gotong royong dan saling menghargai antar sesama masyarakat.
2. Meningkatkan upaya penegakan hukum tanpa mengurangi sensitivitas, toleransi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia, termasuk perlindungan atas hak publik untuk memprotes dan mengadu kepada pemerintah.
3. Segera sahkan RUU Perampasan Asset sebagai bentuk komitmen bersama di dalam pemberantasan KKN sesuai dengan amanat reformasi 98.
4. Segera berantas praktek pengerukan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan yang sangat berpihak pada investor dan tanpa menyertakan keikutsertaan masyarakat hukum adat dan lokal sehingga semakin menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
5. Prioritaskan keadilan sosial dan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus korupsi, tanpa pandang bulu.
6. Tegakkan kewibawaan pemerintah. Hentikan kekerasan dan provokasi, baik verbal maupun fisik.
7. Perkuat komunikasi publik yang jujur, transparan, dan menghormati masyarakat.
8. Buka ruang dialog inklusif antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk mencari solusi bersama.
9. Tingkatkan seluruh kinerja cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif secara signifikan, sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia dan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik dalam demokrasi.

10. Lindungi inisiatif, proyek keberlanjutan, program dan pelaku usaha yang mendukung penanganan krisis iklim agar generasi sekarang dan mendatang Indonesia tidak merugi dan kehilangan kepercayaan global.

Kita harus ingat: Indonesia lebih besar dari satu generasi, satu kelompok, atau satu kepentingan politik. Memerbaiki bangsa ini membutuhkan kerjasama lintas-sektor dan komitmen kolektif untuk menempatkan keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

Penutup

Kami menyerukan agar seluruh pihak mengambil langkah bijak dan berorientasi pada masa depan. Indonesia saat ini berada di persimpangan sejarah. Kita bisa memilih jalan menuju perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan — atau sebaliknya, menjerumuskan diri ke dalam krisis berkepanjangan.

Mari kita jaga rumah bersama ini. Mari kita pulihkan kepercayaan, bangun masa depan, dan pastikan bahwa Indonesia tetap berdiri kokoh, adil, dan lestari bagi semua.

Koalisi Aktivis Keberlanjutan Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian

Jakarta 1 September 2025

1. **Farhan Helmy**, Kepala Sekolah Thamrin School
2. **Jalal**, Reader on Political Ecology, Thamrin School
3. **Ahmad Safrudin**, KPBB
4. **Dicky Edwin Hindarto**, [Yayasan Mitra Hijau](#)~~the Mall Explorer~~
5. **Paul Butarbutar**, ICRES
6. **Mubariq Ahmad**, Thamrin School
7. **Fabby Tumiwa**, IESR
8. **Sonny Mumbunan**, Thamrin School
9. **Nadia Hadad**, MADANI Berkelanjutan
10. **Fitrian Ardiansyah**, Thamrin School
11. **Ari Mochamad**, Thamrin School
12. **Dian Afriyanie**, Thamrin School.
13. **Eka Melisa**, Thamrin School
14. **Eko Teguh Paripurno**, PSMB UPN Veteran Yogyakarta
15. **Victor Rembeth**, Pendeta
16. **Syamsul Ardiansyah**, Thamrin School
17. **Brigitta Isworo**, Thamrin School
18. **Anindito**, Thamrin School
19. **Dian Abraham**, Thamrin School
20. **Sita Supomo**, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA)/Thamrin School
21. **M. Ali Yusuf**, Thamrin School
22. **Hizbullah Arief**, Hijauku.com
23. **Ibrahim Ali-Fauzi**, Thamrin School
24. **Bernadinus Steni**, Thamrin School
25. **Nur R. Fajar**, Thamrin School
26. **Gita Syahrani**, BLESS Indonesia
27. **Alfred Sitorus**, Koalisi Pejalan Kaki
28. **Laode M. Syarif**, Pengajar Hukum Lingkungan

Kontak Media dan Narahubung:

1. **Farhan Helmy** (WA 082117821871)
2. **Jalal** (WA 08119694488)
3. **Ahmad Safrudin** (WA 0816897959)
4. **Sita Supomo** (WA 0811177219)
5. **Gita Syahrani** (WA 081802000025)

Email: info@peacejusticeid.org

Supporting Team: Dehleezto LS Bendang, Saibtullah Qadir.